

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMANFAATAN PAMSIMAS (PROGRAM PENYEDIAAN
AIR BERSIH DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) DI
DESA BULO**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian
guna memperoleh gelar Magister
pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

RIDWAN A

0910581122004



PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2024

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMANFAATAN PAMSIMAS (PROGRAM PENYEDIAAN
AIR BERSIH DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) DI
DESA BULO**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian
guna memperoleh gelar Magister
pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

RIDWAN A

0910581122004



PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN
PAMSIMAS (PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT) DI DESA BULO

TESIS

Untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian
guna memperoleh gelar Magister
pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh:

RIDWAN A
0910581122004

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Untuk diseminarkan atau diujikan

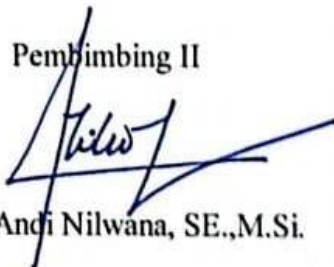
Sidrap, November 2024.

Menyetujui


Pembimbing I


Dr. Nurjannah Nonci, M.Si.

Pembimbing II


Dr. Andi Nilwana, SE.,M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Andi Nilwana, SE.,M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas Ridhanya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Adapun judul laporan tugas akhir yang penulis ajukan adalah “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Desa Bulu”.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi Pascasarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Untuk sampai di titik ini butuh doa dan usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan laporan akhir ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang terus mendukung dan membantu penulis. Teruntuk kedua manusia hebat, orang tua penulis yaitu Anwar dan Iduha yang begitu banyak pengorbanan dan kasih sayangnya kepada penulis. Terima kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.SOS., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
2. Ibu Dr. Nuraini Kasman, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
3. Ibu Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
4. Ibu Nurjannah Nonci, M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan ibu Dr. Andi Nilwana, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmunya untuk membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir dari awal penulisan hingga selesainya laporan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen dan Pengajar Prodi Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang banyak membantu disetiap kegiatan perkuliahan.

6. Seluruh Pegawai dan Staf Prodi Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian kelengkapan administrasi.
7. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah selaku saudara dari kegiatan-kegiatan positif.
8. Saudari saya Nur Inayah'Tul Ma'wah Pasyah, S.Pd., Gr. yang senantiasa memberikan support berupa sumbangsi pemikiran dan motivasi dalam menyelesaikan studi peneliti.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
10. Terima kasih kepada orang tua saya yakni Bapak Anwar dan Ibu Iduha yang telah memberikan motivasi dan kasih saying kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani proses studi penulis.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah mampu melawan ego, rasa malas dan bertahan dari setiap tekanan yang diberikan, selama ini kamu hebat.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. dan akhirnya penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Rappang, 07 Desember 2024
Penulis

Ridwan A

DAFTAR ISI

PROPOSAL TESIS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
A. Konsep Administrasi Publik	10
B. Konsep Partisipasi Masyarakat	12
C. Teori Arnstein 1969 (Tingkatan Partisipasi Masyarakat).....	19
D. Pemanfaatan PAMSIMAS	23
E. Penelitian Terdahulu.....	27
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	29
G. Kerangka Konsep	30
BAB III.....	32
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Metode Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	38
F. Definisi Operasional Variabel.....	41
BAB IV.....	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	43

B. Gambaran Umum Desa Bulo	45
BAB V	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	69
BAB VI.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2. Informan Penelitian	35
Tabel 3. Jumlah penduduk Desa Bulo Tahun 2024	46
Tabel 4. Struktur Pemerintahan Desa Bulo	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat	19
Gambar 2. Kerangka Konsep.....	31
<i>Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Sidrap</i>	<i>44</i>
Gambar 4. Word Cloud Partisipasi Masyarakat	69
Gambar 5. Grafik Pekerjaan Desa Bulo	75
Gambar 6. Grafik Pendidikan dalam KK di Desa Bulo	77
Gambar 7. Grafik Jenis Kelamin Desa Bulo	78

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan PAMSIMAS (Program penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat) di desa Bulo. Partisipasi masyarakat yang diidentifikasi dalam penelitian ini menggunakan teori Arnstein yaitu 8 anak tangga partisipasi yakni *manipulation*, *therapy*, *informing*, *consultation*, *placation*, *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, melibatkan 5 responden yakni informan kunci dan pendukung yang dipilih melalui *snowball sampling*. Data kualitatif dianalisis menggunakan aplikasi NVivo 12 untuk menemukan Tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Bulo dalam pemanfaatan program PAMSIMAS masih berada pada tingkat rendah, berkisar antara *Manipulasi* dan *Konsultasi*. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, namun keterlibatan mereka seringkali terbatas pada bentuk formalitas dan tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program PAMSIMAS, penting bagi pihak penyelenggara untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kapasitas mereka, dan memberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Teori Arnstein, Pemanfaatan, PAMSIMAS, Desa Bulo*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau, dan kontinu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota. Air yang bersih menjadi media transformasi kesehatan bagi tubuh manusia agar tetap hidup, air yang dikonsumsi oleh tubuh manusia tidak hanya sebagai media penghilang dahaga bagi tenggorokan ketika haus tetapi juga sebagai bentuk kebutuhan khusus yang harus terpenuhi oleh tubuh. Demikian besar fungsi air bagi individu dan tubuh yang tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga menjaga kadar cairan tubuh dan fungsi sosial. Oleh karena itu berdasarkan ketiga fungsi tersebut air yang bersih adalah air yang dapat memenuhi syarat fisik aman untuk digunakan, syarat kesehatan yang baik dan secara sosial sumber daya air dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Namun pada kenyataannya, untuk memenuhi syarat kebersihan bukan hal yang mudah, terlebih lagi pada masyarakat miskin yang berada di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Karena sebagian besar masyarakat desa tidak terlalu memperhatikan kadar kebersihan pada air yang mereka konsumsi. Ketidakterdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan air yang layak. Permasalahan rumah yang tidak memiliki modal untuk mempunyai sumur pribadi membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini disadari bahwa keberadaan permukiman kelompok miskin khususnya

permukiman yang berada di wilayah pedesaan pada umumnya kurang memadai, baik dari aspek ketersediaan air bersih, lingkungan yang padat penghuni atau terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana umum

Salah satu program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta melibatkan masyarakat didalamnya adalah dengan menerapkan Program PAMSIMAS. Program tersebut merupakan salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Program PAMSIMAS inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Program ini menekankan pendekatan berbasis masyarakat, di mana peran aktif masyarakat lokal sangat diutamakan dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan fasilitas yang dibangun (Bulo dkk., 2024). Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.

Tujuan Program PAMSIMAS adalah terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Secara lebih rinci Program PAMSIMAS bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatkan akses masyarakat di lokasi program terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan dikelola secara efektif;

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Sasaran program adalah masyarakat, terutama kelompok miskin di pedesaan dan pinggiran kota yang memiliki prevalensi terkait penyakit air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi, mendapatkan layanan air minum dan sanitasi dan terbangun budaya hidup bersih dan sehat (Sufriadi & Zakaria, 2021)

Pasal 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif (Febriarta & Oktama, 2020).

Desa Bulo, Semula merupakan pemakaran dari Desa Timoreng Panua pada tahun 1993 sehingga diganti menjadi Desa Bulo Kemudian Desa Bulo dimakarkan lagi menjadi dua Desa Yaitu Desa Bulo dan Desa Bulo Wattang. Kepala Desa pertama Desa Bulo yaitu *H. Abd. Hafid*. Pada tahun 1993-1995, kemudian Pada tahun 1995 *H. Abd. Hafid* mengundurkan diri, digantikan *Andi Rasyide* menjabat sebagai kepala Desa Bulo tahun 1995-2003. Setelah itu Pada tahun 2003 *Andi Rasyide* digantikan oleh *Haeruddin Halim*. Pada tahun 2008 *Haeruddin Halim*, terpilih kembali kedua kalinya sampai 2014. Pada tahun 2013 *Haeruddin Halim* digantikan oleh *Sukiman, S.Pi* menjabat sebagai Kepala Desa Bulo. Pada tahun

2020 *Sukiman, S.Pi* digantikan oleh *Andi Rifai M. S,Hi* menjabat sebagai kepala Desa Bulu dan masih menjabat sampai sekarang.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pemerintah Desa Bulu sudah melaksanakan program PAMSIMAS selama 10 tahun terhitung sejak tahun 2014, Di Desa Bulu terdapat 4 titik PAMSIMAS. Titik pertama berada di Dusun 1, yang dibangun pada tahun 2014 dan hingga saat ini masih aktif digunakan oleh masyarakat. Titik kedua terletak di Dusun 2, dibangun pada tahun 2016, dan juga masih berfungsi dengan baik serta digunakan oleh warga. Titik ketiga kembali dibangun di Dusun 1 pada tahun 2020, namun sayangnya tidak lagi digunakan oleh masyarakat karena kualitas air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Adapun titik PAMSIMAS terbaru, yang merupakan titik keempat, juga berada di Dusun 1. Dibangun pada tahun 2022, titik ini masih aktif dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari empat titik PAMSIMAS yang ada di Desa Bulu, hanya tiga titik yang masih aktif digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. (Petugas PAMSIMAS, 2024)

Program PAMSIMAS ini tentu masih berjalan hingga sekarang namun belum dikategorikan efektif karena masih banyaknya kendala yang terjadi, sehingga kemanfaatannya belum maksimal dirasakan oleh Masyarakat. Program ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam memberikan kemudahan akses untuk bisa memperoleh air yang bersih. Kondisi wilayah desa yang seperti inilah menjadi alasan mengapa program PAMSIMAS perlu di laksanakan di desa tersebut. Program ini juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk bisa menyukseskan jalannya program (Saputrie dkk., 2022)

Program PAMSIMAS memiliki berbagai tujuan yang mengarah untuk membantu memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri didalamnya. Melibatkan masyarakat atau berbasis masyarakat yang dimaksud adalah suatu upaya bersama-sama yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat dalam menjaga program PAMSIMAS serta melakukan perbaikan terhadap yang rusak dan mengupayakan perubahan terhadap persoalan yang ada, yang biasa disebut dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah suatu keterlibatan atau keikutsertaan seseorang individu atau kelompok dalam suatu kegiatan atau organisasi untuk membangun membangkitkan rasa tolong menolong serta bertanggung jawab tanpa adanya paksaan agar mampu mencapai tujuan masa depan secara bersama. Baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. (Purba & Hazzah, 2022)

Bukan hal yang mudah untuk terus mempertahankan kualitas kemanfaatan program, terlebih lagi pada program yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, pengelola sendiri tidak akan bisa mengatur seluruh permasalahan tanpa adanya bantuan atau partisipasi dari masyarakat, sehingga banyak sekali fenomena yang dirasakan oleh masyarakat selama berjalannya program mulai dari mengalami kesulitan dalam kegiatan memompa air dikarenakan mesin air yang kerap kali rusak, terhambatnya jalan air kerumah-rumah masyarakat dikarenakan pipa air yang bocor 2-3 kali sebulan, hal ini diakibatkan oleh tekanan berat kendaraan yang melintas di dekat pipa air sepanjang jalan poros. Ketika terjadi kerusakan, partisipasi masyarakat terlihat sangat minim, baik dalam bentuk kehadiran langsung untuk memperbaiki pipa yang bocor maupun dalam memberikan masukan yang

bertujuan mencegah kebocoran pipa di masa mendatang. Selain itu, kualitas air juga menurun karena bak penampungan yang sudah tidak terjaga kebersihannya.

Dalam situasi inilah peran aktif masyarakat yang terlibat didalam program sangat dibutuhkan untuk terus mempertahankan keberfungsian program PAMSIMAS dengan keberlanjutan program dimasa yang akan datang. Pelaksanaan program PAMSIMAS ini dilaksanakan atas keinginan masyarakat, agar mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air setiap harinya, oleh karna itu seluruh masyarakat yang terlibat ke dalam program PAMSIMAS diharapkan dapat bekerja sama dalam mengelola jalannya program ini agar tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan dengan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh program (Melati & Suparti, 2023).

Dari fenomena tersebut, penulis melihat bahwasanya program ini merupakan salah satu program andalan bagi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam program dijadikan sebagai mitra untuk membantu pengelola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam program, ditengah munculnya persoalan yang mungkin menjadi alasan program mengalami kemacetan.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang ada di Desa Bulu. Untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mempertahankan pemanfaatan program PAMSIMAS dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Mengingat bahwa suatu program tidak akan bisa bertahan apabila tidak dijaga dan dikelola secara baik, sehingga bagaimana bisa masyarakat tau pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan

memanfaatkan program untuk tetap mempertahankan keberfungsian program PAMSIMAS di Bulo.

Melalui studi kasus di Desa Bulo, penelitian ini akan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program pembangunan, serta bagaimana partisipasi aktif mereka dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari masalah diatas maka bisa disesuaikan dengan teori yang ada, menurut Sherry Arnstein (1969) dalam Arbayah & Suparti (2020) pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American institute of planners* dengan judul “ *A Ladder of citizen participation*”, bahwa terdapat 8 (delapan) tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan yakni manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control .

Teori "A Ladder of Citizen Participation" oleh Sherry Arnstein (1969) salah satu konsep yang paling terkenal dalam kajian partisipasi publik, karena ia menggambarkan tingkatan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Alasan mengapa teori ini sering digunakan dalam kajian-kajian kontemporer seperti yang diadaptasi dalam Arbayah & Suparti (2020), karena keunggulannya dalam menawarkan kerangka yang sederhana namun mendalam untuk memahami derajat keterlibatan warga dalam proses perencanaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Desa Bulo***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program PAMSIMAS di Desa Bulu?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan program PAMSIMAS di Desa Bulu
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas maka adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yaitu diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan berguna juga sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian partisipasi masyarakat dalam mengatasi persoalan PAMSIMAS yang ada.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yaitu diharapkan kedepannya bahwa seluruh proses tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus mendapatkan pengetahuan baru mengenai partisipasi masyarakat terhadap program PAMSIMAS, bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga lingkungan sekitar kita masing-masing.

3. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu diharapkan teori-teori yang ada dalam penelitian ini bisa dijadikan bahan menambah wawasan dan referensi dalam sains melalui teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

Administrasi merupakan keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai baik personal maupun material dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien (Christianingsih, 2021). Siagian dalam Christianingsih (2021) mengemukakan pengertian administrasi adalah : “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” (Turner et al., 2022). Administrasi menurut A Dunsire dapat diartikan sebagai arahan, pemerinthan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan public, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerja individu dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa public, dan sebagai arena bidak kerja akademik dan teoritik (Sawir, 2021).

Menurut Partisipasi masyarakat/publik dalam penyelenggaraan negara jika ditinjau dari perspektif Ilmu Administrasi Publik dapat ditelusuri dari pergeseran dan pemaknaan terhadap paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik (Chien & Lin, 2021). Pergeseran paradigma tersebut diakui, dalam tataran praktis pun, memiliki implikasi nyata terhadap praktik penyelenggaraan administrasi publik untuk mendukung penguatan kapasitas birokrasi pemerintahan dalam melakukan

perubahan guna menjalankan perannya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bagi kesejahteraan masyarakat. (Mukhlis, 2021).

Hal itu bertujuan untuk memotret sejauh mana pengaplikasian nilai dan pendekatan partisipasi publik dalam mengatur dan mengurus urusan atau persoalan publik (public affairs) yang menjadi lokus dari administrasi publik. Administrasi Publik Chandler dan Plano dalam Yulanda & Fachri Adnan (2023), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut L. Lyod G. Nigro mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi 3 cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan bagian dari proses politik, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat (Mukhlis, 2021).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif

dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah. (Mukhlis, 2021).

Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

- a) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
- b) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti.
- c) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor didalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
- d) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

(Mukhlis, 2021)

B. Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata partisipasi dapat diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan (Latif dkk., 2020). Kata partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik. Totok dalam Kartika dkk (2024) mengatakan bahwa partisipasi adalah turut sertanya Masyarakat pada proses mengidentifikasi potensi dan masalah, ikut sertanya Masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, serta keterlibatan dalam proses evaluasi kegiatan.

Menurut (Suharto, 2006) masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan- kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Masyarakat juga dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu dengan yang lain (Darsanudin & Subadi, 2023).

Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. Pasaribu (1982:17) mengemukakan sebagai berikut: (1) rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan keterikatan, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi, (2) keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk partisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, apabila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan, (3) kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi, (4) adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan prasyarat lahirnya partisipasi, dan (5) iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh. Partisipasi (Irawan & Sunandar, 2020)

Mikkelsen dalam Wanimbo dkk., (2021) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Keith David definisi dari partisipasi yaitu sebagai keterlibatan mental, pikiran moral, atau perasaan di dalam situasi yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam usaha mencapai tujuan, serta ikut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Oben Wisabla dkk., 2024)

Menurut Rosenbloom & Kravchuk (2005) Menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaat teori-teori dan proses- proses manajemen, politik, dan hukuk untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, eksekutif

dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian (Darsanudin & Subadi, 2023)

Konsep Slamet (2002:66) dalam Sabardila dkk., (2020) menyebutkan dua macam tingkat partisipasi yaitu:

1. Partisipasi horizontal yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota dalam suatu perkumpulan.
2. Partisipasi dalam proses politik yaitu partisipasi yang dilakukan bawahan dengan atasan, antara klien dan patron atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan politis secara pemungutan suara, kampanye dan sebagainya. Sedangkan keterlibatan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi.

Slamet (2002:84) klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi yang disadari pada Sembilan dasar yang satu sama lain jarang terpisahkan dalam banyak hal, mengidentifikasi suatu kegiatan partisipasi yang ada dari Sembilan tipe yang ada. Dalam setiap klasifikasi menunjukkan dua macam partisipasi yang diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial dalam rangka tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat (Sabardila dkk, 2020)

Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu pemberdayaan masyarakat dengan peran serta kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan atau kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi Pembangunan (Kumar, 2020). Empat bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat seperti partisipasi buah pikir, tenaga fisik, keterampilan dan kemahiran, dan harta benda (Bobsuni & Ma'ruf, 2021) Berdasarkan konsep partisipasi tentunya banyak ahli berpandangan dalam mendefinisikan arti dari definisi partisipasi ini, Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian (Indahningrum, 2020). Partisipasi dapat juga diartikan sebagai pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk usaha penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa (Fikri et al., 2020). Dari pengertian diatas bisa diketahui bahwa partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan seseorang dalam penentuan suatu kebijakan baik berupa saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Menurut Siagian (1985 : 2) partisipasi dapat bersifat pasif maupun aktif, partisipasi bersifat pasif berarti sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan seseorang dengan tidak mengganggu kegiatan pembangunan. Sedangkan partisipasi yang bersifat aktif seperti: ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada (Taufik, 2021).

Dari beberapa pengertian diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sunarto, mengenai Partisipasi masyarakat itu sendiri adalah proses saat warga, sebagai makhluk individu maupun berkelompok sosial dan organisasi, ikut serta mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan atau regulasi yang langsung dalam mempengaruhi kehidupan mereka (Indahningrum, 2020), sama halnya yang dikatakan oleh Adi (2013) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di tengah masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan proses evaluasi perubahan yang terjadi (Tedja, 2020).

Maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan kebijakan ataupun keputusan melalui pertimbangan yang matang dalam menentukan kelangsungan hidup masyarakat dalam memperoleh pemecahan masalah.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Menurut (Supriatna, 2000) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Bahwa masyarakat akan lebih mencapai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut.
- c. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. (Matipa, 2020)

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Permata dkk, (2024) partisipasi terbagi atas empat jenis

berdasarkan sistem dan mekanisme antara lain:

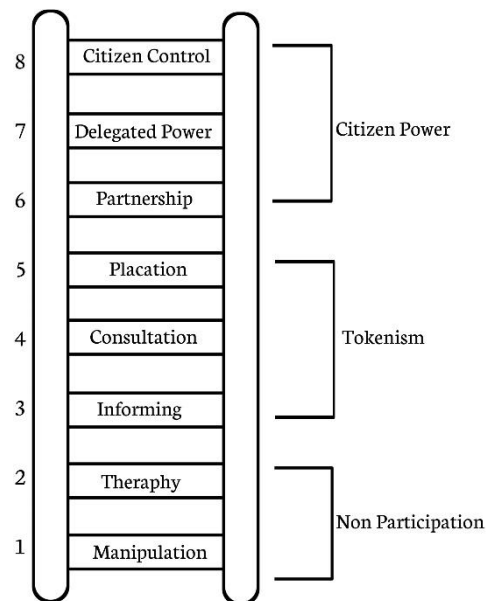
1. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini

berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas Pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

2. *Participation in Implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.
3. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
4. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya, memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

C. Teori Arnstein 1969 (Tingkatan Partisipasi Masyarakat)

Sherry Arnstein (1969) dalam Arbayah & Suparti (2020) pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American institute of planners* dengan judul “ *A Ladder of citizen participation*”, bahwa terdapat 8 (delapan) tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan.



Gambar 1. Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat

Delapan tangga tingkat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Manipulation* (Manipulasi)

Manipulasi termasuk pada tingkatan dari Arnstein yang paling rendah, masyarakat hanya digunakan untuk persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi diselewengkan sebagai alat untuk publikasi dari pihak penguasa (Arbayah & Suparti, 2020).

2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dimana anggota masyarakat hanya di perlakukan seperti melakukan penyembuhan pasien dalam terapi. Masyarakat ini sudah terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan, namun pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak mendapat keuntungan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah (Arbayah & Suparti, 2020).

3. *Informing* (Informasi)

Partisipasi pada tahap informasi masyarakat diberikan informasi terkait hak-hak mereka, tanggung jawab, dan berbagai pilihan. Dalam tahap informasi ini yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pemegang kekuasaan kepada masyarakat, pada tahap informasi kemungkinan masyarakat akan sedikit sekali untuk mempengaruhi rencana kegiatan. Hal ini terjadi karena informasi yang diberikan biasanya pada akhir perencanaan (Arbayah & Suparti, 2020).

4. *Consultation* (konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengan pendapat dengan Masyarakat (Arbayah & Suparti, 2020).

5. *Placation* (Penenteraman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan- badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota- anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhan, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah (Arbayah & Suparti, 2020).

6. *Partnership* (Kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam pemecahan berbagai masalah. Sehingga telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan Masyarakat (Arbayah & Suparti, 2020).

7. *Delegated Power* (Pelimpahan Kekuasaan)

Masyarakat telah diberi limpahan wewenang untuk memberikan keputusan pada rencana atau program tertentu. Pemegang kekuasaan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tawar menawar dengan masyarakat. Wewenang yang telah diberikan kepada masyarakat untuk membuat keputusan terhadap rencana itu kemudian ditetapkan oleh pemerintah (Arbayah & Suparti, 2020).

8. *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat)

Pada tingkat kontrol masyarakat ini adalah masyarakat diberikan kekuatan untuk mengatur sebuah program atau kelembagaan terkait kepentingan masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat bernegosiasi kepada pihak luar untuk melakukan perubahan. Pada tingkat ini masyarakat langsung berkaitan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan tanpa melalui pihak ketiga dan masyarakat memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sebuah program yang dibuatnya (Arbayah & Suparti, 2020).

Menurut Arnstein, peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat tipologi partisipasi diatas, Arnstein menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat upacara semu (empty ritual) dengan bentuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (Real Power) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses (Arbayah & Suparti, 2020).

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “Non peran serta” , dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan (1) terapi dan (2) manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakat yang berperan serta. Tangga ketiga, keempat, dan kelima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika peran serta

hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat “Tokenisme” adalah (3) penyampaian informasi (Informing), (4) Konsultasi, dan (5) Peredaman Kemarahan (Placation) (Arbayah & Suparti, 2020).

Selanjutnya Arnstein mengategorikan tiga tangga teratas kedalam tingkat “Kekuasaan Masyarakat” (citizen power). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan (6) Kemitraan (Partnership) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi (7) Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power) dan (8) Pengawasan masyarakat (Citized Control). Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (non elite) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu (Arbayah & Suparti, 2020).

D. Pemanfaatan PAMSIMAS

Menurut Poerwadarminta (2002:125) pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. (Oktaviani et al., 2020) :

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di diartikan berfaedah. Definisi lain juga dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yaitu: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore

penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima” (Nadiyah, 2021).

Pemanfaatan adalah suatu bentuk kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Oktaviani et al., 2020).

Bila dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan berarti menggunakan wadah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebagai solusi terbaik yang ada dalam mengatasi persolan kebutuhan air bersih, Dari pengertian pemanfaatan diatas peneliti berkesimpulan bahwa Pemanfaatan PAMSIMAS Sebuah cara atau metode dalam mengatasi persoalan air bersih, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Melalui PAMSIMAS diharapkan mampu memberikan solusi ditengah problematika air bersih, sehingga segala kebutuhan manusia bisa tercukupi dengan baik, sebagaimana dalam islam dikatakan yaitu:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. (Qs. An-Nahl: 10)

Melalui ayat diatas dari sang pencipta sudah selayaknya kita sebagai umat manusia atau masyarakat yang berakal dan berkeyakinan untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar dengan penuh kesadaran tanggung jawab melalui wadah

pemerintah yang telah disediakan untuk mengatasi persoalan yang hadir ditengah masyarakat, khususnya persoalan air bersih yang bisa diatasi dengan hadirnya PAMSIMAS yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat yang harus menumbuhkan kesadaran dalam diri maupun dalam lingkungan bermasyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga lingkungan demi keberlangsungan ketersediaan air bersih.

Program PAMSIMAS merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berfokus pada penyelesaian permasalahan masyarakat terkait air dan lingkungan di tingkat desa. Pengelolaan program ini perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaannya. Apabila terdapat kendala atau kesalahan yang berpotensi menghambat jalannya program, masyarakat bersama pengelola harus segera mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, keberlanjutan program PAMSIMAS dapat terjaga, sehingga manfaatnya tidak terhenti di tengah jalan (Desyana & Widyakanti, 2022).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menargetkan peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia, Kemudian hadir Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan pentingnya penyediaan air minum dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2016

tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang mengatur standar dan pedoman teknis untuk penyediaan air minum di Indonesia. (Insan dkk., 2024)

Undang-Undang ini berisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan. RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Chien & Lin, 2021).

Di Kabupaten Sidrap, pelaksanaan Program PAMSIMAS mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengadaptasinya ke dalam peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidrap mengintegrasikan Program PAMSIMAS sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah guna mencapai target peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kehadiran Program PAMSIMAS merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, program ini juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat melalui pengelolaan yang baik. Keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga, merawat, serta mengembangkan lingkungan. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang kondusif dan mendukung kesejahteraan

masyarakat secara berkelanjutan.

PAMSIMAS dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat, dengan cara melibatkan masyarakat pada setiap proses pelaksanaan program. Program PAMSIMAS mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menjalankan program, agar masyarakat bisa mandiri dalam pengelolaan operasionalnya dan juga mampu memelihara sarana yang dibangun untuk kepentingan bersama.

E. Penelitian Terdahulu

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Jenis, Metode Penelitian	Pengumpulan Data	Hasil
1.	“Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Jaya (Sufriadi & Zakaria, 2021)	Deskriptif Kualitatif, Menggunakan Analisis SWOT	Wawancara	Masyarakat Ikut Berpartisipasi dalam program Penyediaan Air Bersih
2.	“Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Kecamatan Garagai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” (Tri dkk., 2020)	Deskriptif Kualitatif, Analisis SWOT, menggunakan uji korelasi Rank Spearman	Observasi dan Wawancara	Masyarakat ikut serta dalam program PAMSIMAS
3.	“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Minum Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa	Kualitatif	Observasi, Angket, dan Dokumentasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat Cukup Tinggi

	Bongkang RT.06 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong” (Darsanudin & Subadi, 2023)			
4.	“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi (Studi Di Kecamatan Ujung Pangkajene Kabupaten Gresik)” (Angraini dkk., 2020)	Kualitatif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi	Masyarakat ikut berperan aktif
5.	“PartisipasiMasyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2022 di Desa Batu Putih Kabupaten Konawe Selatan” (Ibal & Abubakar, 2023)	Kualitatif	Observasi, wawancara	Masyarakat memiliki partisipasi cukup tinggi

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan analisis SWOT sebagai kerangka teori utama dalam mengevaluasi Program PAMSIMAS, dengan fokus pada identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi keberhasilan program. Pendekatan ini memberikan gambaran umum tentang kondisi program namun sering kali kurang mendalami aspek partisipasi masyarakat sebagai salah satu komponen kunci keberhasilan.

Sebagai pembeda, penelitian ini menggunakan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein, yang menawarkan pendekatan lebih mendalam dan terarah dalam mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS.

Kelebihan Penelitian Ini:

1. Pendekatan Lebih Komprehensif

Dengan menggunakan teori Sherry Arnstein, penelitian ini mampu memberikan analisis yang lebih mendetail terkait partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat manipulasi hingga kemitraan sejati.

2. Fokus pada Dimensi Sosial

Penelitian ini menitikberatkan pada peran masyarakat sebagai aktor utama dalam keberlanjutan program, yang sering terabaikan dalam penelitian berbasis analisis SWOT.

3. Relevansi yang Lebih Tinggi

Pendekatan teori ini lebih relevan dengan tujuan PAMSIMAS yang berbasis masyarakat, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan ataupun program pemberdayaan, faktor-faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan program dan menghambat pelaksanaan program (Ayu, 2021).

Menurut Plumer dalam Hajar (2022) beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

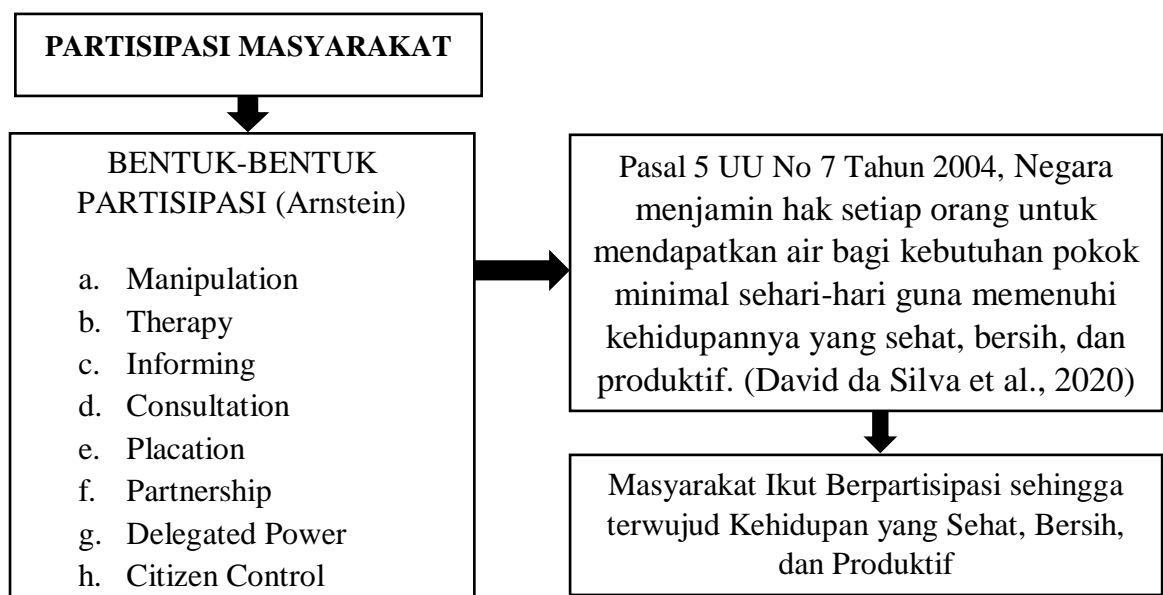
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

G. Kerangka Konsep

Sehubungan dengan harapan kita bersama baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat demi terwujudnya praktik hidup bersih maka pemerintah telah mengambil langkah yang konkret dalam mewujudkan hal itu dengan telah dibentuk program pemerintah dalam menjaga, dan merawat lingkungan agar senantiasa dalam keadaan yang kondusif dan berkecukupan terkhususnya dalam hal ketersediaan air bersih, dan untuk mewujudkan hal itu maka dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak yang ada baik dari pihak pemerintah terlebih lagi masyarakat secara universal.

Tentunya dalam mengatasi suatu masalah atau problematika haruslah didasari dengan kemauan dan kesadaran yang kuat, khususnya dalam mengatasi persoalan lingkungan, dalam hal ini bagaimana kita memanfaatkan segala hal yang ada disekitar kita dengan baik khususnya persoalan ketersediaan air yang sulit untuk diatasi akibat kurangnya sikap peduli dalam menjaga lingkungan. Maka untuk senantiasa menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat diharapkan partisipasi dan keikutsertaannya dalam memelihara dan menjaga lingkungan demi kepentingan keluarga maupun masyarakat yang ada disekitar kita masing-masing, melalui program PAMSIMAS dikaitkan dengan teori Arnstein yakni 8 tingkatan partisipasi masyarakat.

Uraian diatas merupakan kerangka konseptual yang menjadi dasar teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, untuk lebih memudahkan dalam memahami kerangka tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 2. Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Recana lokasi pada penelitian ini yaitu di Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya yaitu di Program PAMSIMAS di Desa Bulu, alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, pemanfaatan PAMSIMAS, dan yang factor-faktor mempengaruhi PAMSIMAS di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Desa Bulu sesuai dengan uraian yang ada pada latar belakang masalah, adapun waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan (Agustus-Oktober 2024).

Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, program PAMSIMAS tahap pertama dan kedua dinilai berhasil, sehingga pemerintah pusat kembali mempercayakan pelaksanaan program PAMSIMAS tahap ketiga. Salah satu desa yang telah menerapkan program ini adalah Desa Bulu, dengan dua titik penempatan bangunan PAMSIMAS, yaitu di Dusun 1 (Dusun Bulu) dan Dusun 2 (Dusun Kampung Baru).

Penelitian ini mengambil lokasi tersebut karena Selain kedekatan geografis dengan peneliti, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber, termasuk situs web dan referensi lainnya, terkait penelitian mengenai Program PAMSIMAS. Hasil pencarian menunjukkan bahwa masih sangat sedikit, bahkan hampir tidak ditemukan, penelitian yang secara khusus membahas implementasi PAMSIMAS di Kabupaten Sidrap. Selain itu, berdasarkan pengamatan langsung, terdapat masalah kebocoran pipa di wilayah tersebut yang sering kali tidak

mendapatkan perhatian. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan dan memelihara fasilitas pengelolaan air yang telah disediakan oleh pemerintah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pengalaman peneliti bahwa metode ini efektif untuk menggali dan memahami fenomena yang sering kali sulit dipahami secara memadai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap kondisi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan PAMSIMAS di Desa Bulu, serta memberikan kebenaran berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data kualitatif bersifat metode pengambilan sampel yang dikenal sebagai "snowball sampling" digunakan ketika sumber data awalnya sedikit dan banyak. Hal ini dilakukan karena orang-orang baru yang dapat dijadikan sebagai

sumber data dicari karena sumber data yang terbatas tidak dapat memberikan informasi yang cukup. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, jumlah informan sumber data akan bertambah seperti bola salju yang menggelinding (Suriani dkk., 2023)

Snowball sampling adalah sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif. Penetapan sementara informan sumber data dalam proposal pada akhirnya akan digantikan oleh peneliti lapangan. Untuk “membuka pintu” di mana pun peneliti akan mengumpulkan data, sumber data pada awalnya dipilih oleh mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh atas kondisi sosial atau hal yang diteliti (Nugraha, 2021).

Informan atau subjek penelitian adalah golongan yang diminta untuk dapat memberikan informasi atau keterangan secara menyeluruh sesuai dengan fakta dan pendapat informan terkait fenomena yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Informan kunci.
2. Informan pendukung

Informan kunci merupakan golongan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang fenomena yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui kondisi yang ada didalam masyarakat secara garis besar tetapi juga mengetahui informasi tentang informan utama. Informan kunci dipilih berdasarkan bahan pertimbangan, karna informan kunci diharapkan merupakan golongan yang paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Informasi yang diberikan oleh informan penelitian harus berupa informasi yang bermanfaat

untuk penelitian. Sehingga akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memahami situasi yang akan diteliti. Sedangkan informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Informan penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Bulo yang memiliki keterlibatan dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah seluruh informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, cirinya antara lain :

1. Informan berada di daerah yang diteliti
2. Informan mengetahui kejadian/permasalahan
3. Informan bisa berargumentasi dengan baik dan lancar
4. Informan merasakan dampak dari permasalahan
5. Informan ikut terlibat didalam program pamsimas

Untuk memudahkan pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	AR	Kepala Desa	Informan kunci

2.	HS	Ketua PAMSIMAS Desa Bulo	Informan kunci
3.	MY	Petugas Teknis PAMSIMAS	Informan kunci
4.	SM	Tokoh Masyarakat	Informan pendukung
5.	HL	Tokoh Masyarakat	Informan pendukung

D. Teknik Pengumpulan Data

Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan diperoleh berdasarkan data sekunder (Pedoman Petunjuk Teknis PAMSIMAS) data primer (wawancara) (Sufriadi & Zakaria, 2021), Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka atau literature review dari buku, jurnal, artikel, berita, dan sumber lainnya, sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan atau pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu dalam rangka untuk memperoleh bukti-bukti yang valid dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan sedang terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan mendapatkan data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian (Hanafie et al., 2022)

2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menggali sebuah informasi secara lisan. Untuk mendapatkan data

yang valid dan detail hal ini harus dilakukan secara mendalam. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan terkait penelitian, sehingga nantinya ditemukan data baru yang mungkin tidak terdapat dalam bentuk dokumen (Reni, 2024).

Data mentah menjadi data utama dalam penelitian karna diperoleh langsung oleh peneliti dari informan. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis (Reni, 2024).

a. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari teknik penelitian kualitatif seperti wawancara dan observasi. Rekaman ini bisa berbentuk teks, seni khususnya karya seni yang monumental atau keduanya. catatan tertulis, seperti jurnal, sejarah hidup, dongeng, biografi, aturan, dan kebijakan. dokumen berbasis visual, termasuk gambar, gambar, dan gambar real-time (Fiantika dkk, 2022)

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif, sebaaian besar fakta-fakta dan data akan tersimpan dalam bentuk dokumentasi.

Proses pembuktian data dokumentasi bisa dilakukan dalam bentuk jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran dan arkeologis. Pada penelitian ini dokumentasi data bisa berbentuk surat, catatan, foto dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahan dokumenter nya terbagi menjadi beberapa macam seperti : otobiografi dan memorial. Data ini mempunyai sifat yang tak terbatas ruang dan waktu, sehingga bisa digunakan untuk menggali informasi yang telah lalu (Fiantika dkk, 2022).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mengolah data menjadi sebuah informasi agar lebih mudah untuk dipahami, sehingga bisa bermanfaat untuk menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah dalam sebuah penelitian (Fiantika dkk., 2022). Analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi sebuah informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan (Fiantika dkk., 2022).

Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif dari Milles & Huberman (1994) dalam Rambe & Afri (2020) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

a) Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data, dengan menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai data lapangan. Kemudian peneliti harus mampu

menyusun data atau menyeleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

b) Melaksanakan Display Dan atau Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap untuk penyajian data. Data hasil lapangan yang sangat banyak, tidak mungkin dipaparkan semuanya. Oleh karena itu, dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh penelitian untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

c) Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutann dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulakn, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Didapat kesimpulan sementara yang dapat diuji kembali di lapangan. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

Validitas data merupakan alat ukur yang terjadi antara objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan lah langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil penelitian untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul (Amelia Utami, 2022).

Dalam penelitian ini, untuk mengukur validnya data yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, teknik ini kerap digunakan karna teknik ini mempunyai sifat menggabungkan teknik pengumpulan data dengan

sumber data supaya data yang didapatkan lebih akurat dan efisien (Amelia Utami, 2022). Peneliti akan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pebanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan .

1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono (2007) memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data (Fiantika dkk., 2022).

2) Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti (Fiantika dkk, 2022).

Analisis data menggunakan software Nvivo 12 plus, yaitu software analisis data kualitatif yang mempunyai kemampuan mengklasifikasi data secara baik (Anggraeni et al., 2021).

F. Definisi Operasional Variabel

1. Partisipasi Masyarakat

Tingkat keterlibatan warga desa Bulu dalam setiap tahap program PAMSIMAS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dilihat dari Persentase warga yang menghadiri rapat perencanaan program. Jumlah warga yang terlibat dalam pelaksanaan program (misalnya, partisipasi dalam gotong royong).

2. Pemanfaatan Program Penyediaan Air Bersih

Sejauh mana warga desa Bulu menggunakan fasilitas air bersih yang disediakan oleh program tersebut. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dari program. Volume air bersih yang dikonsumsi per rumah tangga per hari. Frekuensi pemakaian fasilitas air bersih. Tingkat pemahaman warga tentang pentingnya air bersih untuk kesehatan.

3. Pemanfaatan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat

Sejauh mana warga desa Bulu menggunakan dan memelihara fasilitas sanitasi yang disediakan oleh program tersebut, Jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi dari program. Kondisi kebersihan fasilitas sanitasi (misalnya, toilet umum, tempat cuci tangan), Frekuensi pemakaian fasilitas sanitasi. Tingkat pemahaman warga tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan.

4. Desa Bulo, Wilayah administrasi tertentu di mana program PAMSIMAS diimplementasikan. Lokasi geografis dan batas-batas administrasi desa. Data demografis desa (jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dll).

Definisi operasional ini akan membantu dalam mengukur dan menganalisis variabel-variabel yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan program secara sistematis dan terukur.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Keadaan Geografis Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak \pm 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “Kota Beras” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Badan Pusat Statistik (2024) menjelaskan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak diantara titik koordinat $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ LS dan $119^{\circ}41' - 120^{\circ}$ BT. Dengan ketinggian antara 10m-150m dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah antara lain;

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Madya Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. \

Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 Km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan. Berikut dapat kita lihat dalam peta Kabupaten Sidrap.

B. Gambaran Umum Desa Bulo

1. Sejarah Desa Bulo

Desa Bulo merupakan salah satu Desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng. Desa Bulo terdiri atas dua (2) dusun yakni Dusun Bulo dan Dusun Kampung Baru. Desa Bulo adalah merupakan Daerah pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (ayam ras). Desa Ini terletak pada ketinggian 10 M -1500 M dari wilayah permukaan Laut, Berikut gambaran tentang sejarah Pemerintahan desa ini.

2. Letak Geografis Desa Bulo

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Timur : Desa Cipo Takari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2) Sebelah Utara : Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- 3) Sebelah Barat : Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4) Sebelah Selatan : Desa Talawe Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang

b. Titik koordinat kantor desa terletak di :

- 1) Garis Lintang : -3,8407189
- 2) Garis Bujur : 119,8594622
- 3) Ketinggian Dari Permukaan Air Laut : 60 mdpl

c. Adapun luas area wilayah desa terdiri dari:

- 1) Luas permukiman : 304,21 Ha
- 2) Luas persawahan : 508,95 Ha
- 3) Luas perkebunan : 321,32 Ha
- 4) Luas pekuburan : 90 Are
- 5) Luas pekarangan : 91,00
- 6) Luas perkantoran Desa : 15 Are
- 7) Luas prasarana umum lainnya : -

d. Orbitasi Waktu Tempuh dan Jarak

- 1) Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 17 Km
- 2) Jarak Ke Ibukota Kabupaten : 7 Km
- 3) Jarak Ke Ibukota Propinsi : 213,8 Km
- 4) Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 7 Menit
- 5) Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten : 15 Menit
- 6) Waktu tempuh ke ibukota Provinsi : 3 jam 30 menit

3. Jumlah Penduduk Desa Bulo

Penduduk dalam suatu desa merupakan indikator yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan suatu desa, Dimana jumlah penduduk sangat mempengaruhi dari perkembangan desa tersebut, maka untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Desa Bulo berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat melalui table dibawah ini:

Table 3. Jumlah penduduk Desa Bulo Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.364

2.	Perempuan	1.376
	Jumlah	2.740

Sumber : Website Resmi Desa Bulu

Dari tabel diatas dilihat bahwa penduduk Desa Bulu berjumlah 2.348 jiwa yang terdiri dari laki – laki 1.214 jiwa dan perempuan 1.224 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 710 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin (M) 64 KK.

4. Struktur Pemerintahan Desa

Tugas pemerintahan desa pada umumnya ialah melayani berbagai kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek dalam segi kehidupan mulai dari masalah kemandirian, ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Pemerintahan desa juga sangat berperan penting dalam perkembangan Desa Bulu. Adapun struktur pemerintahan desa dilihat pada tabel berikut:

Table 4. Struktur Pemerintahan Desa Bulu

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Andi Rifai M S.HI	Kepala Desa	27/07/1980	L	S1
2	Muh.Akbar S.AP	Sekretaris	21/06/1991	L	S1
3	Herlindah S.AP	Kasi Pemerintahan	27/01/1987	L	S1
4	Surianti	Kasi Pelayanan	08/03/1985	P	SLTA
5	Hamka S.H	Kasi Kesejahteraan	11/07/1990	P	S1
6	Hasdaniar Hatang	Kaur umum	21/01/1998	P	SLTA

7	Nurfadillah	Kaur Perencanaan	09/05/1992	P	S1
8	Isma S.Ap	Kaur Keuangan	19/03/1994	P	S1
9	Muh. Yudha M S.Ip	Staff Perencanaan	23/12/1995	P	S1
10	Nafilah Fikriah S.E	Staff Keuangan	04/06/1997	P	S1
11	La Hatang	Kadus Kampung Baru	31/12/1954	L	SLTA
12	Jasmin	Kadus Bulu	05/05/1985	L	SLTA

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Partisipasi Menurut Sherry Arnstein

a. Manipulasi (*Manipulation*)

Manipulasi, dalam konteks tangga partisipasi Arnstein, merujuk pada tingkatan partisipasi publik yang paling rendah dan paling tidak otentik. Pada level ini, pemerintah atau pihak berwenang seolah-olah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, namun sebenarnya tujuan utama adalah untuk mengendalikan opini publik dan memastikan keputusan tetap berada di tangan mereka. Partisipasi masyarakat pada level ini lebih bersifat formalitas semata, tanpa memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat untuk mempengaruhi hasil akhir. Dalam temuan peneliti melalui teknik wawancara terhadap informan kunci dan pendukung yakni sebagai berikut:

1) Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa keputusan-keputusan dalam program PAMSIMAS sudah ditentukan sebelumnya tanpa masukan dari Masyarakat?

a) AR: *"Secara umum, kami selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, ada beberapa keputusan teknis yang memang membutuhkan pertimbangan dari ahli. Kami berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat."*

b) HS: *"Awalnya, memang ada beberapa keputusan yang sudah ditetapkan. Tapi, seiring berjalannya waktu, kami semakin terbuka terhadap masukan"*

dari masyarakat. Sekarang, kami sering mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai hal terkait PAMSIMAS."

c) MY: *"Sebagai petugas teknis, saya lebih fokus pada aspek teknis program. Namun, saya selalu berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya keputusan-keputusan yang diambil."*

d) SM: *"Saya merasa bahwa keputusan-keputusan besar sudah ditentukan dari atas. Masyarakat hanya diajak untuk menyetujui saja."*

e) HL: *"Saya melihat ada upaya untuk melibatkan masyarakat, tapi masih ada beberapa keputusan yang terasa dipaksakan."*

2) Apakah ada upaya dari pihak pemerintah untuk menjelaskan tujuan program, atau Bapak/Ibu merasa hanya mengikuti keputusan yang sudah dibuat?

a) AR: *"Kami selalu berusaha menjelaskan tujuan program PAMSIMAS kepada masyarakat. Kami mengadakan sosialisasi, pertemuan, dan juga memanfaatkan media sosial."*

b) HS: *"Kami sering mengadakan pertemuan untuk menjelaskan tujuan program dan manfaatnya bagi masyarakat. Kami juga membuat kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan berbagai masalah."*

c) MY: *"Saya selalu berusaha untuk menjelaskan secara sederhana kepada masyarakat tentang teknologi yang digunakan dalam PAMSIMAS dan bagaimana cara merawatnya."*

d) SM: *"Penjelasan tentang tujuan program memang ada, tapi tidak terlalu detail. Saya merasa banyak masyarakat yang masih belum paham betul."*

e) HL: "*Penjelasan yang diberikan terkadang terlalu teknis, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam.*"

Dari hasil wawancara tersebut, Kepala Desa, Ketua PAMSIMAS, dan Petugas Teknis menyatakan bahwa mereka telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, penjelasan mereka cenderung lebih fokus pada aspek teknis dan prosedur formal. Sedangkan Tokoh masyarakat 1 dan 2 secara tegas menyatakan bahwa keputusan-keputusan penting sudah ditentukan sebelumnya dan masyarakat hanya diajak untuk menyetujui. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi pihak pelaksana dan masyarakat mengenai tingkat partisipasi yang sebenarnya.

b. Terapi/penyembuhan (*Therapy*)

Model partisipasi publik yang diusulkan oleh Sherry Arnstein, yakni "terapi" merupakan salah satu dari delapan tingkat partisipasi, yang termasuk dalam kategori "non-partisipasi". Pada tingkat ini, masyarakat seolah-olah dilibatkan dalam suatu program atau proyek, namun tujuan utama dari keterlibatan tersebut bukanlah untuk memberikan kekuasaan kepada masyarakat, melainkan untuk menenangkan atau "menyembuhkan" kegelisahan masyarakat. Dalam temuan peneliti melalui teknik wawancara terhadap informan kunci dan pendukung yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap cara pihak PAMSIMAS memberikan edukasi terkait air bersih dan sanitasi? Apakah lebih bersifat mengarahkan tanpa melibatkan ide atau kebutuhan masyarakat?

- a) AR: *"Secara umum, edukasi yang diberikan cukup baik. Namun, saya rasa masih perlu ditingkatkan dalam hal melibatkan masyarakat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Mungkin bisa diadakan semacam forum diskusi."*
- b) HS: *"Edukasi yang diberikan sudah cukup membantu masyarakat memahami pentingnya air bersih dan sanitasi. Tapi, saya rasa masih kurang interaktif. Masyarakat perlu diajak untuk aktif bertanya dan memberikan masukan."*
- c) MY: *"Kami berusaha memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, kadang sulit untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan spesifik setiap individu."*
- d) SM: *"Edukasi yang diberikan lebih banyak bersifat satu arah. Masyarakat kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan."*
- e) HL: *"Saya merasa edukasi yang diberikan terlalu umum. Masyarakat perlu diberikan contoh-contoh yang lebih konkret terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat."*
- 2) Apakah menurut Bapak/Ibu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan atau kebutuhannya sendiri, atau hanya mengikuti arahan pihak penyelenggara?
- a) AR: *"Kami selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan atau kebutuhannya. Ada beberapa forum yang bisa dimanfaatkan untuk itu."*

- b) HS: *"Kami berusaha untuk mendengarkan setiap masukan dari masyarakat. Namun, terkadang sulit untuk mengakomodasi semua permintaan karena keterbatasan sumber daya."*
- c) MY: *"Kami berusaha untuk mencatat semua permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan mencari solusi yang terbaik."*
- d) SM: *"Masyarakat kurang berani untuk menyampaikan pendapatnya karena merasa tidak paham atau takut salah."*
- e) HL: *"Saya merasa masyarakat lebih banyak mengikuti arahan daripada menyampaikan inisiatif sendiri."*

Dari hasil wawancara tersebut, mayoritas narasumber menilai bahwa edukasi yang diberikan cukup baik, namun masih kurang interaktif dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program PAMSIMAS lebih berfokus pada penyampaian informasi daripada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan permasalahan, namun seringkali merasa kurang percaya diri atau tidak didengarkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk partisipasi, namun masyarakat belum merasa sepenuhnya dihargai dan didengarkan.

Berdasarkan jawaban para narasumber, dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS belum sepenuhnya mencapai tingkat "Terapi/Penyembuhan" dalam model Anak Tangga Arnstein. Program ini

lebih berfokus pada penyampaian informasi daripada pada proses dialog dan penyelesaian masalah bersama.

c. Informasi (*Informing*)

Dalam model partisipasi publik yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, "informasi" merupakan salah satu dari delapan tingkat partisipasi. Pada tingkat ini, masyarakat diberikan informasi mengenai suatu program atau proyek, namun tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau mempengaruhi keputusan. Tujuan utama dari tingkat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang suatu isu atau program. Maka dari itu peneliti mendapatkan temuan melalui proses wawancara terhadap informan kunci dan informan pendukung yaitu:

1) Sejauh mana informasi terkait program PAMSIMAS disampaikan kepada Anda? Apakah masyarakat mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai program tersebut?

a) AR: *"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Mulai dari sosialisasi awal hingga pertemuan rutin. Namun, saya menyadari bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami."*

b) HS: *"Informasi sudah cukup banyak yang disampaikan. Namun, saya rasa masih perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan."*

- c) MY: *"Kami selalu berusaha memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, kadang ada beberapa istilah teknis yang sulit dihindari."*
- d) SM: *"Informasi yang diberikan sudah cukup, tapi terkadang terlalu banyak istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam."*
- e) HL: *"Saya merasa informasi yang diberikan sudah cukup lengkap. Masyarakat sudah mengerti pentingnya program PAMSIMAS."*
- 2) Apakah Anda merasa cukup dipahami tentang peran Anda dalam program ini atau hanya sebatas menerima informasi yang sudah ada?
- a) AR: *"Saya berharap masyarakat lebih aktif terlibat dalam program ini. Peran mereka sangat penting dalam keberhasilan program PAMSIMAS."*
- b) HS: *"Saya rasa masyarakat sudah memahami peran mereka. Namun, masih perlu ada pembinaan yang berkelanjutan agar mereka tetap aktif."*
- c) MY: *"Masyarakat sudah mulai sadar akan peran mereka. Namun, masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan fasilitas."*
- d) SM: *"Saya merasa masyarakat masih kurang paham tentang peran mereka dalam menjaga keberlanjutan program PAMSIMAS."*
- e) HL: *"Masyarakat sudah cukup paham tentang peran mereka, namun perlu ada insentif agar mereka lebih termotivasi."*

Dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwa program PAMSIMAS telah berhasil menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan program PAMSIMAS dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

d. Konsultasi (*Consultation*)

Dalam model partisipasi publik yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, "konsultasi" merupakan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan "informasi". Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan mengenai suatu program atau proyek. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pihak berwenang.

1) Apakah pihak pemerintah pernah meminta pendapat atau umpan balik dari masyarakat sebelum memulai atau selama program PAMSIMAS berlangsung?

a) AR: *"Ya, sebelum program dimulai, kami selalu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mereka. Namun, untuk perubahan yang signifikan selama program berlangsung, mungkin masih terbatas."*

b) HS: *"Awalnya, kami memang melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Tapi, setelah program berjalan, kesempatan untuk memberikan masukan semakin sedikit."*

- c) MY: *"Kami lebih fokus pada aspek teknis program. Jadi, interaksi dengan masyarakat lebih banyak terkait masalah-masalah teknis yang muncul."*
- d) SM: *"Seingat saya, kami hanya diajak pada saat sosialisasi awal. Setelah itu, jarang sekali ada kesempatan untuk memberikan masukan."*
- e) HL: *"Kami memang pernah diajak memberikan masukan, tapi lebih bersifat formalitas. Masukan kami belum tentu ditindaklanjuti."*
- 2) Apakah ada hasil nyata dari masukan yang Anda atau masyarakat lain berikan terkait program ini?
- a) AR: *"Ada beberapa masukan masyarakat yang kami tindaklanjuti. Misalnya, terkait pemilihan lokasi sumur bor. Namun, tidak semua masukan dapat langsung diakomodasi."*
- b) HS: *"Beberapa masukan masyarakat memang kami pertimbangkan. Misalnya, terkait jadwal pemeliharaan. Namun, masih banyak masukan yang belum terakomodasi."*
- c) MY: *"Masukan masyarakat sangat berguna untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di lapangan."*
- d) SM: *"Sejujurnya, saya belum melihat hasil yang signifikan dari masukan yang kami berikan."*
- e) HL: *"Masukan kami lebih banyak didengar daripada ditindaklanjuti. Saya berharap ke depannya partisipasi masyarakat bisa lebih dihargai."*

Dari beberapa hasil wawancara narasumber, mayoritas narasumber mengakui bahwa masyarakat pernah diajak memberikan masukan, terutama pada tahap awal program. Namun, kesempatan untuk memberikan masukan secara berkelanjutan masih terbatas. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, namun tingkat keterlibatan masih belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih sebatas konsultasi, di mana masyarakat hanya memberikan masukan tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir.

Berdasarkan jawaban para narasumber, dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS berada pada tingkat "Konsultasi" dalam model Anak Tangga Arnstein. Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, namun tingkat pengaruh mereka terhadap keputusan akhir masih terbatas.

e. Penentruman/perujukan (*Placation*)

Tingkat "penentruman" dalam anak tangga Arnstein menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Meskipun masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat, namun partisipasi mereka lebih bersifat simbolis dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir. Untuk mewujudkan partisipasi publik yang sejati, pemerintah dan pihak berwenang perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa masukan masyarakat benar-benar

dipertimbangkan dan diimplementasikan. Berikut wawancara hasil wawancara terhadap informan kunci dan inform pendukung:

1) Apakah Anda merasa bahwa beberapa perwakilan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi keterlibatan tersebut hanya sebagai formalitas?

a) AR : *Kami berusaha melibatkan berbagai pihak, namun memang ada kendala dalam mengakomodasi semua masukan. Kadang, keputusan akhir tetap harus diambil oleh pihak yang berwenang."*

b) HS: *"Saya merasa bahwa keterlibatan masyarakat masih kurang optimal. Beberapa keputusan penting seringkali sudah ditetapkan sebelum melibatkan kami."*

c) MY: *"Kami lebih banyak berinteraksi dengan kelompok pengelola. Masyarakat umum seringkali hanya menerima informasi yang sudah jadi."*

d) SM: *"Saya merasa bahwa keterlibatan kami hanya sebatas memberikan masukan. Keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah."*

e) HL: *"Saya setuju bahwa keterlibatan masyarakat masih kurang substansial. Kami lebih banyak didengar daripada dilibatkan dalam pengambilan keputusan."*

2) Apakah ada pihak tertentu dari masyarakat yang menurut Anda diberi kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam program ini?

- a) AR: *"Biasanya, tokoh masyarakat dan perwakilan RT/RW yang lebih sering dilibatkan. Namun, kami berusaha untuk melibatkan semua pihak secara merata."*
- b) HS: *"Kelompok pengelola diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Namun, masyarakat umum juga perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi."*
- c) MY: *"Kami lebih banyak berinteraksi dengan kelompok pengelola dan tokoh masyarakat."*
- d) SM: *"Biasanya, tokoh masyarakat dan kelompok pemuda yang lebih aktif terlibat."*
- e) HL: *"Kelompok perempuan seringkali kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan."*

Mayoritas narasumber merasa bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih bersifat formalitas. Keputusan penting seringkali sudah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat diajak berpartisipasi, namun tingkat pengaruh mereka terhadap keputusan akhir masih sangat terbatas. Terdapat kecenderungan untuk melibatkan kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT/RW, dan kelompok pengelola. Sementara itu, kelompok lain seperti perempuan, cenderung kurang dilibatkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam partisipasi masyarakat. Beberapa kelompok merasa lebih diwakili daripada kelompok lainnya.

Berdasarkan jawaban para narasumber, dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS berada pada tingkat "Penentrangan/Perujukan" dalam model Anak Tangga Arnstein. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, namun partisipasi tersebut lebih bersifat formalitas dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir.

f. Kerjasama (*Partnership*)

Dalam model partisipasi publik yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, "kemitraan" merupakan tingkat partisipasi di mana terjadi kolaborasi yang sejajar antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada tingkat ini, keputusan diambil secara bersama-sama melalui proses negosiasi dan kesepakatan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Hasil wawancara dengan informan kunci dan pendukung sebagai berikut:

1) Apakah ada kolaborasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah/penyelenggara dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam program PAMSIMAS?

a) AR: *"Ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti musyawarah desa untuk menentukan lokasi sumber air. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah."*

- b) HS: *"Kami berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun, terkadang ada kendala teknis yang membutuhkan keputusan dari pihak ahli."*
- c) MY: *"Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting, terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas. Kami sering mengadakan pelatihan untuk masyarakat."*
- d) SM: *"Saya merasa kolaborasi masih kurang. Masyarakat lebih banyak menerima daripada memberikan masukan."*
- e) HL: *"Ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat, tapi lebih bersifat formalitas."*
- 2) Sejauh mana Anda merasa masyarakat memiliki kendali yang setara dengan pihak penyelenggara dalam pengelolaan program ini?
- a) AR: *"Masyarakat memiliki peran yang sangat penting, namun kendali penuh tetap berada di tangan pemerintah."*
- b) HS: *"Kami berusaha memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, namun keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan pemerintah."*
- c) MY: *"Masyarakat memiliki peran dalam pemeliharaan, namun untuk keputusan teknis, kami lebih berwenang."*
- d) SM: *"Saya merasa masyarakat hanya memiliki kendali yang terbatas."*
- e) HL: *"Masyarakat lebih banyak sebagai penerima manfaat daripada sebagai pengambil keputusan."*

Terdapat beberapa bentuk kolaborasi antara masyarakat dan pihak penyelenggara, terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, tingkat kolaborasi masih belum merata dan keputusan akhir seringkali masih berada di tangan pihak penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, namun tingkat kemitraan belum tercapai secara optimal. Mayoritas narasumber merasa bahwa masyarakat belum memiliki kendali yang setara dengan pihak penyelenggara dalam pengelolaan program. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Berdasarkan jawaban para narasumber, dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS belum mencapai tingkat "Kemitraan" dalam model Anak Tangga Arnstein. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, namun hubungan antara masyarakat dan pihak penyelenggara masih bersifat hirarkis, di mana pihak penyelenggara memiliki otoritas yang lebih besar.

g. Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Power*)

Dalam model partisipasi publik yang diusulkan oleh Sherry Arnstein, "pelimpahan kekuasaan" (*delegated power*) merupakan tingkat partisipasi di mana masyarakat diberikan wewenang yang lebih besar untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya. Ini adalah langkah maju signifikan dari tingkat kemitraan, di mana kekuasaan lebih terdistribusi secara merata. Dengan memberikan wewenang kepada masyarakat, kita dapat menciptakan

masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. Dalam konteks program PAMSIMAS, pelimpahan kekuasaan dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program serta memperkuat partisipasi masyarakat. Hasil wawancara terhadap informan kunci dan informan pendukung yakni

1) Apakah masyarakat memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting terkait pelaksanaan program PAMSIMAS di daerah Anda?

a) AR: *"Secara umum, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam program PAMSIMAS. Mereka terlibat dalam berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun, keputusan-keputusan strategis yang bersifat teknis biasanya melibatkan pihak ahli."*

b) HS: *"Kami sebagai perwakilan masyarakat memiliki kewenangan untuk mengambil beberapa keputusan, seperti pemilihan lokasi sumur atau jenis teknologi yang akan digunakan. Namun, keputusan besar tetap harus melalui musyawarah desa."*

c) MY: *"Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan pendapat. Namun, keputusan akhir terkait aspek teknis biasanya diambil berdasarkan pertimbangan teknis."*

d) SM: *"Saya merasa masyarakat hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah."*

e) HL: *"Kami ingin memiliki lebih banyak wewenang dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas."*

2) Apakah Anda merasa ada aspek-aspek dari program ini yang dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat?

a) AR: *"Sulit untuk mengatakan bahwa ada aspek yang sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat. Program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan pihak teknis."*

b) HS: *"Masyarakat memiliki kendali penuh dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas setelah program selesai. Namun, untuk tahap perencanaan dan pembangunan, kami masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah."*

c) MY: *"Aspek yang paling banyak melibatkan masyarakat adalah dalam hal operasional dan pemeliharaan sehari-hari."*

d) SM: *"Saya merasa masyarakat belum memiliki kendali yang cukup, terutama dalam hal pengalokasian anggaran."*

e) HL: *"Masyarakat harus diberikan lebih banyak kepercayaan untuk mengelola program ini secara mandiri."*

Masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan, namun wewenang yang diberikan masih terbatas. Keputusan-keputusan strategis seringkali masih berada di tangan pihak penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dilibatkan, namun tingkat partisipasi mereka masih belum optimal. Masyarakat memiliki kendali penuh dalam pengelolaan

dan pemeliharaan fasilitas setelah program selesai. Namun, untuk tahap perencanaan dan pembangunan, masyarakat masih sangat bergantung pada pihak penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan kekuasaan kepada masyarakat masih bersifat parsial dan belum merata di semua tahap program.

Berdasarkan jawaban para narasumber, dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS belum sepenuhnya mencapai tingkat "Pelimpahan Kekuasaan" dalam model Anak Tangga Arnstein. Masyarakat telah diberikan sebagian wewenang, namun masih terdapat banyak kendala dan keterbatasan.

h. Kontrol Masyarakat (*Citizen Power*).

Dalam model partisipasi publik yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, "kontrol masyarakat" (citizen power) merupakan tingkat partisipasi tertinggi di mana masyarakat memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya sekedar berpartisipasi, tetapi juga memegang kendali atas proses pembangunan. Tingkat "kontrol masyarakat" merupakan cita-cita tertinggi dalam partisipasi publik. Meskipun sulit untuk mencapai tingkat ini secara penuh, namun upaya untuk mendekati diri pada tingkat ini perlu terus dilakukan. Dengan memberikan kontrol yang lebih besar kepada masyarakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan berkeadilan.

- 1) Apakah masyarakat memiliki kendali penuh atas keputusan yang dibuat terkait program PAMSIMAS?

- b) AR: *"Secara ideal, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam prakteknya, seringkali ada keterlibatan dari pihak lain seperti pemerintah atau lembaga terkait. Ini karena program PAMSIMAS melibatkan aspek teknis yang membutuhkan keahlian khusus."*
- c) HS: *"Kami sebagai perwakilan masyarakat memiliki wewenang untuk mengambil beberapa keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sehari-hari. Namun, untuk keputusan besar seperti pemilihan teknologi atau sumber dana, biasanya melibatkan musyawarah dengan berbagai pihak."*
- d) MY: *"Kendali penuh atas keputusan teknis biasanya berada di tangan pihak yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Namun, masukan dari masyarakat sangat kami pertimbangkan."*
- e) SM: *"Saya rasa masyarakat belum memiliki kendali penuh. Seringkali, keputusan sudah ditetapkan sebelum melibatkan kami."*
- f) HL: *"Kami ingin memiliki lebih banyak wewenang dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat."*
- 2) Apakah ada contoh di mana masyarakat secara mandiri mengambil keputusan penting tanpa intervensi pihak luar?
- a) AR: *"Ada beberapa contoh di mana masyarakat secara mandiri mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah yang terkait dengan air bersih, seperti melakukan gotong royong membersihkan sumber air atau"*

memperbaiki saluran pipa. Namun, untuk proyek besar yang membutuhkan dana, biasanya melibatkan bantuan dari pemerintah."

- b) HS: *"Masyarakat sering kali mengambil keputusan terkait jadwal pemeliharaan atau kontribusi masyarakat. Namun, untuk keputusan yang berdampak jangka panjang, biasanya melibatkan musyawarah dengan pihak lain."*
- c) MY: *"Saya belum menemukan contoh di mana masyarakat mengambil keputusan penting tanpa melibatkan pihak teknis sama sekali. Ini karena banyak keputusan yang membutuhkan pertimbangan teknis yang mendalam."*
- d) SM: *"Saya belum pernah melihat contoh di mana masyarakat mengambil keputusan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar."*
- e) HL: *"Masyarakat perlu diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengambil keputusan sendiri. Misalnya, dalam pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat."*

Mayoritas narasumber mengakui bahwa masyarakat belum memiliki kendali penuh atas keputusan yang dibuat dalam program PAMSIMAS. Keputusan-keputusan strategis seringkali melibatkan pihak lain seperti pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dilibatkan, namun tingkat partisipasi mereka masih belum mencapai tingkat kontrol yang penuh.

Ada beberapa contoh di mana masyarakat mengambil inisiatif sendiri, namun umumnya terbatas pada skala kecil dan tidak melibatkan keputusan-

keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa potensi masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri masih belum termaksimalkan.

Berdasarkan jawaban para narasumber, dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS belum mencapai tingkat "Kontrol Masyarakat" dalam model Anak Tangga Arnstein. Masyarakat memiliki peran dalam program, namun kendali penuh atas semua aspek program masih berada di tangan pihak lain.

B. Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini mencoba untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program PAMSIMAS di Desa Bulu, berikut adalah hasil word cloud yang di dapatkan dari hasil wawancara yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang kemudian di olah dalam NVivo:



Gambar 4. Word Cloud Partisipasi Masyarakat

Gambar tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program PAMSIMAS sangat rendah, hal ini sejalan dengan

hasil analisis data yang di dapatkan dari hasil wawancara informan kunci dan informan pendukung. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Bulo dalam program PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat) dianalisis menggunakan model 8 anak tangga partisipasi Arnstein. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS di Desa Bulo masih rendah dan cenderung bersifat formalitas. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam berdasarkan setiap tangga partisipasi:

a. Manipulasi (Manipulation)

Pada tingkat manipulasi, masyarakat dilibatkan secara simbolis, tanpa benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan yang penting. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua PAMSIMAS, dan Petugas Teknis menunjukkan bahwa mereka merasa telah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pengakuan ini tidak sejalan dengan pernyataan dua tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan utama sudah ditentukan sebelumnya dan masyarakat hanya diminta untuk menyetujui. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara persepsi pihak pelaksana dan masyarakat, yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak diberikan ruang yang berarti dalam pengambilan keputusan.

b. Terapi (Therapy)

Pada tingkat terapi, masyarakat diberikan edukasi, tetapi lebih berfokus pada penyampaian informasi tanpa mendorong partisipasi aktif. Meskipun mayoritas narasumber menilai edukasi yang diberikan cukup baik, mereka juga mengungkapkan bahwa edukasi tersebut kurang interaktif dan

belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan masalah, tetapi mereka sering merasa tidak didengarkan atau kurang percaya diri untuk berbicara. Hal ini mengindikasikan bahwa program PAMSIMAS di Desa Bulo lebih mengutamakan proses penyampaian informasi daripada pembentukan dialog yang membangun partisipasi aktif.

c. Placation (Kompensasi)

Pada tingkat ini, meskipun masyarakat diajak untuk berpartisipasi, pengaruh mereka terhadap keputusan tetap terbatas. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan pada keputusan akhir. Keputusan-keputusan penting seringkali sudah ditetapkan sebelumnya, dan hanya kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat dan pengelola program, yang diutamakan untuk terlibat. Kelompok masyarakat lainnya, seperti perempuan, merasa kurang dilibatkan. Ini menunjukkan ketidakmerataan dalam partisipasi, di mana beberapa kelompok lebih diwakili daripada yang lainnya.

d. Kerjasama (Partnership)

Tingkat kemitraan dicapai ketika ada kolaborasi sejajar antara masyarakat dan pihak penyelenggara dalam pengambilan keputusan. Walaupun ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi masih belum optimal. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai pelaksana

daripada pengambil keputusan. Mayoritas narasumber merasa bahwa mereka belum diberdayakan sepenuhnya untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Hal ini mencerminkan bahwa kemitraan yang diinginkan dalam program PAMSIMAS belum tercapai, karena keputusan akhir masih banyak diambil oleh pihak penyelenggara.

e. Informasi (Informing)

Pada tingkat informasi, masyarakat diberikan pengetahuan tentang program tanpa banyak kesempatan untuk memberikan masukan atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun program PAMSIMAS telah berhasil menyampaikan informasi kepada masyarakat, ada ruang yang cukup besar untuk meningkatkan partisipasi. Masyarakat hanya menerima informasi teknis tentang penggunaan fasilitas, tetapi partisipasi mereka dalam merancang atau menentukan keputusan terkait program ini terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disampaikan, interaksi dua arah yang mendorong partisipasi lebih lanjut belum optimal.

f. Konsultasi (Consultation)

Pada tingkat konsultasi, masyarakat diajak memberikan masukan, tetapi pengaruh mereka terhadap keputusan akhir masih terbatas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memang diajak untuk memberikan masukan, terutama pada tahap awal program. Namun, kesempatan untuk memberikan masukan secara berkelanjutan sangat terbatas, dan masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan yang diambil. Ini mencerminkan bahwa program

PAMSIMAS di Desa Bulu berada pada tahap konsultasi, di mana masyarakat hanya memberikan masukan, tetapi tidak mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak penyelenggara

g. Kekuasaan yang Didelegasikan (Delegated Power)

Pada tingkat ini, sebagian besar kekuasaan diberikan kepada masyarakat untuk mengelola program secara mandiri. Meskipun masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan mengelola fasilitas setelah program selesai, keputusan strategis terkait perencanaan dan pembangunan masih sangat bergantung pada pihak penyelenggara. Dengan demikian, pelimpahan kekuasaan kepada masyarakat masih bersifat parsial dan belum merata di semua tahap program. Masyarakat diberi wewenang terbatas, namun keputusan-keputusan strategis masih tetap berada di tangan pihak eksternal.

h. Kontrol Masyarakat (Citizen Control)

Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kendali penuh atas keputusan dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bulu belum mencapai tingkat ini. Walaupun ada beberapa inisiatif dari masyarakat yang terbatas pada skala kecil, kendali penuh atas program PAMSIMAS masih berada di tangan pihak eksternal, seperti pemerintah dan lembaga terkait. Keputusan-keputusan strategis, seperti anggaran dan perencanaan utama, tetap melibatkan pihak luar tanpa pengaruh signifikan dari masyarakat. Masyarakat belum diberdayakan untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam program ini.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam keberhasilan program PAMSIMAS. Di Desa Bulo, tingkat partisipasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi hambatan dan mengembangkan strategi guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program PAMSIMAS. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan keberlanjutan program PAMSIMAS:

a. Pengetahuan dan keahlian

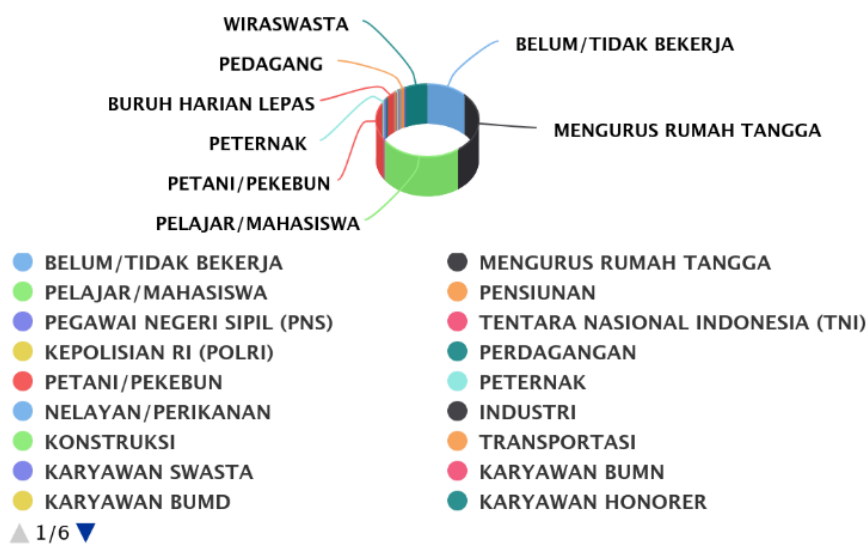
Pengetahuan dan keahlian merupakan faktor penting yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program. Di Desa Bulo, mayoritas penduduk memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang terbatas, yang dapat mempengaruhi sejauh mana mereka dapat memahami dan terlibat dalam program PAMSIMAS. Keterbatasan pengetahuan ini sering kali menghambat pemahaman mereka tentang berbagai tahap dan bentuk partisipasi, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Penduduk dengan pengetahuan yang terbatas cenderung kurang menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada, seperti pengelolaan air bersih dan sanitasi. Selain itu, rendahnya pengetahuan tentang teknik pengelolaan atau perbaikan fasilitas yang rusak bisa membuat masyarakat merasa tidak mampu berkontribusi secara efektif

dalam perbaikan atau pengembangan program. Tanpa pemahaman yang memadai, mereka juga mungkin tidak memahami dampak jangka panjang dari partisipasi mereka terhadap keberlanjutan program.

Untuk mengatasi hal ini, program PAMSIMAS di Desa Bulu perlu menyertakan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat, mereka dapat lebih aktif berpartisipasi, memahami berbagai tingkatan partisipasi, serta dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan merawat fasilitas air yang disediakan pemerintah.

b. Pekerjaan masyarakat.



Highcharts.com

Gambar 5. Grafik Pekerjaan Desa Bulu

Berdasarkan gambar tersebut, pekerjaan masyarakat menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program PAMSIMAS. Di Desa Bulu, mayoritas penduduk memiliki pekerjaan yang beragam, seperti mengurus rumah tangga, menjadi pelajar atau mahasiswa,

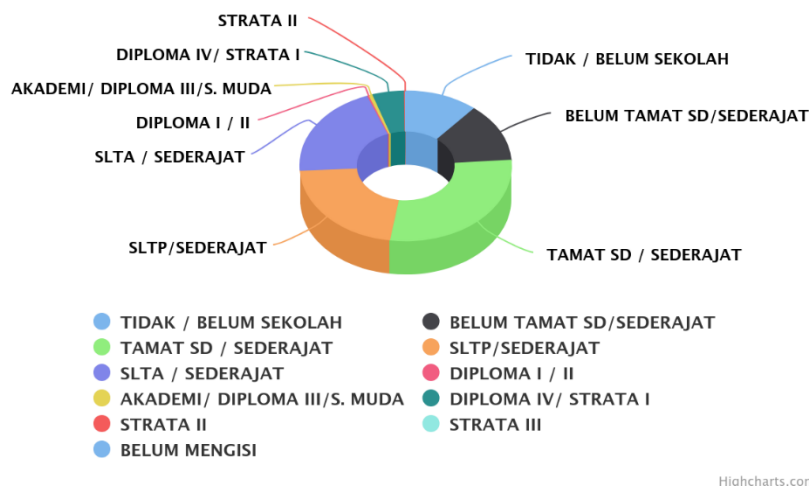
petani/pekebun, dan sebagian lainnya tidak atau belum bekerja. Setiap jenis pekerjaan ini memiliki dampak yang berbeda terhadap kemampuan individu untuk meluangkan waktu dalam berpartisipasi.

Bagi mereka yang mengurus rumah tangga, misalnya, meskipun tidak terikat pada pekerjaan luar, tanggung jawab domestik yang tinggi sering kali membatasi waktu dan energi yang bisa mereka alokasikan untuk kegiatan lain, termasuk berpartisipasi dalam program-program desa. Di sisi lain, pelajar dan mahasiswa cenderung memiliki waktu luang yang lebih banyak, namun komitmen terhadap studi dapat menjadi penghalang utama untuk terlibat dalam kegiatan lain.

Sementara itu, petani dan pekebun yang tergantung pada musim atau kondisi alam juga mungkin menghadapi kendala waktu, terutama pada musim tanam atau panen. Waktu mereka yang terbatas untuk bekerja di ladang dapat mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan program PAMSIMAS. Sedangkan bagi mereka yang tidak atau belum bekerja, meskipun mereka memiliki lebih banyak waktu, faktor lain seperti kurangnya pemahaman atau motivasi untuk berpartisipasi bisa menjadi hambatan.

Dengan demikian, faktor pekerjaan di Desa Bulo menunjukkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar dapat melibatkan semua lapisan masyarakat secara lebih efektif.

c. Tingkat pendidikan



Gambar 6. Grafik Pendidikan dalam KK di Desa Bulu

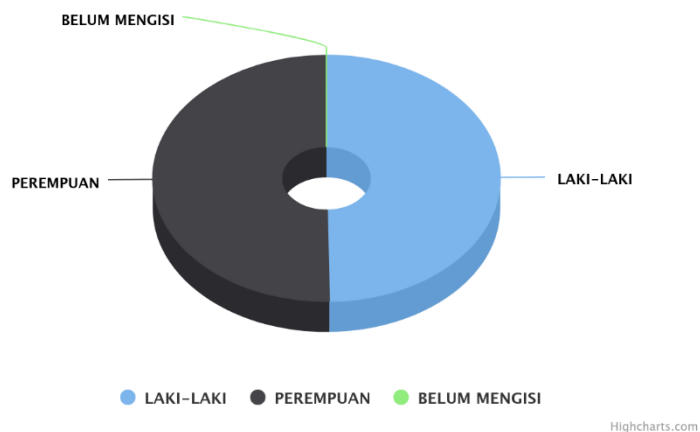
Tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS. Di Desa Bulu, mayoritas penduduk merupakan tamatan SD, SMP, dan SMA, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat cenderung terbatas. Hal ini dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan program dan bagaimana mereka dapat terlibat secara efektif.

Bagi masyarakat yang hanya tamat SD atau SMP, pemahaman terhadap konsep-konsep teknis atau administratif yang terkait dengan program PAMSIMAS mungkin terbatas. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk memahami peran mereka dalam berbagai tingkatan partisipasi, seperti pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, meskipun sebagian besar penduduk yang tamat SMA memiliki pemahaman yang lebih baik, mereka mungkin masih menghadapi hambatan dalam mengakses

informasi yang lebih mendalam atau dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program.

Tingkat pendidikan yang lebih rendah juga dapat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk menyampaikan pendapat atau mengusulkan perubahan dalam pengelolaan program, yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam evaluasi dan perbaikan program. Oleh karena itu, penting untuk menelaraskan tingkat informasi dan pendekatan yang digunakan dalam program agar sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bulo, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan aktif berpartisipasi.

d. Jenis kelamin.



Gambar 7. Grafik Jenis Kelamin Desa Bulo

Faktor jenis kelamin seringkali memengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program seperti PAMSIMAS. Di Desa Bulo, mayoritas penduduknya berjenis kelamin perempuan, yang memberikan dinamika tersendiri dalam partisipasi masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali

menghadapi tantangan lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan luar rumah, terutama di masyarakat yang masih memegang norma tradisional yang membatasi peran perempuan di luar urusan domestik.

Di Desa Bulu, perempuan yang sebagian besar terlibat dalam pekerjaan rumah tangga atau usaha kecil-kecilan mungkin kesulitan untuk meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan air atau kegiatan lain yang terkait dengan program PAMSIMAS. Selain itu, adanya pandangan bahwa perempuan lebih fokus pada peran domestik dapat membuat mereka kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan program yang lebih strategis. Hal ini bisa menghambat optimalisasi potensi perempuan dalam memberikan kontribusi yang berarti dalam program.

Namun, seiring dengan perubahan sosial dan peningkatan kesadaran, ada peluang untuk memberdayakan perempuan di Desa Bulu dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan yang lebih luas, seperti pendidikan tentang sanitasi dan pengelolaan air. Untuk itu, penting bagi program PAMSIMAS untuk menyusun pendekatan yang sensitif gender, yang dapat mengakomodasi waktu, peran, dan kontribusi perempuan dalam setiap tahap program, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan setara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan 8 anak tangga partisipasi Arnstein, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Bulu dalam pemanfaatan program PAMSIMAS masih berada pada tingkat rendah, berkisar antara *Manipulasi* dan *Konsultasi*. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, namun keterlibatan mereka seringkali terbatas pada bentuk formalitas dan tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program PAMSIMAS, penting bagi pihak penyelenggara untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kapasitas mereka, dan memberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program PAMSIMAS:

1. Peningkatan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

Diperlukan penguatan kegiatan sosialisasi awal yang tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan metode partisipatif seperti diskusi kelompok dan simulasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga fasilitas air bersih dan sanitasi.

2. Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkelanjutan

Program pelatihan teknis yang ditujukan kepada masyarakat perlu diperluas, khususnya terkait pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas. Hal ini akan membantu masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk menjaga keberlanjutan fasilitas tanpa ketergantungan penuh pada pihak eksternal.

3. Penguatan Peran Pemerintah Lokal

Pemerintah desa atau kelurahan perlu lebih proaktif dalam mendukung program PAMSIMAS dengan menyediakan anggaran pendukung yang memadai, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat. Pendekatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan keberhasilan program.

4. Meningkatkan Inovasi dalam Pelaksanaan Program

Disarankan untuk mengembangkan model pelaksanaan program yang inovatif, seperti penggunaan teknologi digital untuk penyuluhan dan pelaporan kondisi fasilitas. Selain itu, pengenalan sistem penghargaan (reward system) untuk komunitas yang berhasil menjaga fasilitas dengan baik dapat memotivasi partisipasi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Utami, F. T. U. (2022). Motivasi Penyandang Disabilitas Netra Dalam Upaya Mengembangkan Kemandirian di Yayasan Netra Mandiri Palembang. *Indonesian Journal of Behavioral Studies*, 3(1), 23–38. http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/23520%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/23520/9/DAFTAR_PUSTAKA_Skripsi_Amelia_Utami.pdf
- Anggraeni, A. D., Salahudin, S., Jamil, A. S., & Rofida, S. (2021). Analisis Kualitatif Obat Tradisional Sebagai Agen Peningkatan Imunitas Tubuh Dalam Melawan Covid-19 Di Surat Kabar Online Indonesia. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 8(2), 207. <https://doi.org/10.31596/jkm.v8i2.684>
- Anggraini, C., Maratus, S., Latifah Varadilla, N., & Trisna Febrianti, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi (Studi Di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 3(2), 27–31. <https://doi.org/10.22437/jpb.v3i2.8494>
- Arbayah, S., & Suparti, H. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 39–48. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.516>
- Ayu, G. M. (2021). *Analisis Bentuk–Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kampung Pelangi Di Kota Semarang* [Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/24409/>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Sidenreng Rappang Dalam Angka 2024* (B. K. S. Rappang (ed.); Vol. 16). BPS Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Publika*, 215–226. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p215-226>
- Bulo, M. A. M., Ekayani, A. D., & ... (2024). Implementasi PAMSIMAS dalam Mendukung Pencapaian SDGs ke-6 di Indonesia. *Innovative: Journal Of ...*, 4, 10269–10282. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13847>
- Chien, C. W., & Lin, C. Y. (2021). Community Participation of School-Age Children: Who is at Risk of Restricted Participation? *Physical and Occupational Therapy in Pediatrics*, 41(5), 447–463. <https://doi.org/10.1080/01942638.2021.1900489>

- Christianingsih, E. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Darsanudin, & Subadi, W. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Bongkang Rt.06 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis (JAPB)*, 6(2), 128–140.
- David da Silva, D., Pereira, S. B., & Vieira, E. de O. (2020). Integrated Water Resources Management in Brazil. *Integrated Water Resource Management*, 13–26. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16565-9_2
- Desyana, A., & Widyakanti, W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4(2), 80. <https://doi.org/10.20527/jpp.v4i2.6531>
- Febriarta, E., & Oktama, R. (2020). Pemetaan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Dan Air Bersih Di Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 283–289. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.283-289>
- Fiantika, M. W., Jumiyati, Honesti, Wahyuni, & Jonata. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Fikri, D., Safitri Romain, I. A., Wulandari, W., Selaswati, S., Tasari, A. E., Renhoat, A. A., Masrani, M., Ainur Roat, M. Z., Hartono, H., Hamseh, A., & Saiful Mila, M. A. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(2), 98. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558>
- Hanafie, A., Haslindah, A., & Suradi, S. (2022). Penerapan Waktu Kerja Dengan Metode Pengukuran Kerja Secara Langsung Pada Proses Pembuatan Putu. *ILTEK : Jurnal Teknologi*, 17(02), 130–135. <https://doi.org/10.47398/iltek.v17i02.22>
- Ibal, L., & Abubakar, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2022 di Desa Batu Putih Kabupaten Konawe Selatan. *AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i1.150>
- Indahningrum, R. putri. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Agen dalam Meningkatkan*

Partisipasi Masyarakat Melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018. 2507(1), 1–9.

Insan, I. H., Putra, R. M., Putra, F. K., & Pakuan, U. (2024). *Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Ditinjau Dari Hukum Tata Ruang.* 11(2), 54–64.

Irawan, A., & Sunandar, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. In *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 12, Nomor 03). <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>

Kartika, I., Barmawi, F. H., & Yuningsih, N. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak melalui Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak di RW 05 Balongsari Surabaya. *Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 104–113.

Kumar, S. (2020). Community participation in palliative care: Reflections from the ground. *Progress in Palliative Care*, 28(2), 83–88. <https://doi.org/10.1080/09699260.2019.1706272>

Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26–39. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.209>

Matipa, B. (2020). The Extent of Community Participation in Constituency Development Fund (CDF) Project Identification in Mwense Constituency. *International Journal of Public Administration*, 43(8), 668–681. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1645686>

Melati, & Suparti, H. (2023). *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Mugkur Ma'asih Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.* 6(2), 549–561.

Mukhlis, A. mussaddad. (2021). *PARIWISATA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Disusun dan diajukan oleh : ANDI MUSADDAD MUKHLIS PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK (S2) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Menyetujui.*

Nadiyah, D. L. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Akidah Akhlak Di MTS NU Banat Kudus. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 13(2), 263–280. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v13i2.393>

Nugraha, A. J. C. (2021). *Faktor Determinasi Pengembangan Usaha Sentra Batik Tulis Tegalan (Studi kasus di desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten*

Tegal) [Pancasakti Tegal]. <https://core.ac.uk/download/pdf/388591607.pdf>

- Oben Wisabla, James Modouw, & Lazarus Ramandei. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Trikora Distrik Benawa Kabupaten Yalimo. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(1), 28–52. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i1.298>
- Oktaviani, M. R., Ramawi, D. H. M., Dirgantara, M., Sos, S. M., & Si, M. A. P. (2020). Analisis Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Oleh Mahasiswa STIA-NUSA Dalam Menyelesaikan Skripsi. *Jurnal Administrasi Nusantara mahasiswa (JAN Maha)*, 2(10), 111–116.
- Permata, I. A. K. D. C., Aditya, I. G. N. A. K., & Mahadewi, N. M. A. S. (2024). Partisipasi Pemuda dalam Program Kegiatan Penggalangan Dana Sekaa Teruna Teruni Pancaka Putra Pejaten. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(2), 55–65. <https://doi.org/10.61292/shkr.107>
- Purba, Y. S., & Hazzah, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Jandiraya Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun. *Profesional Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(2), 475–484.
- Rambe, A. Y. F., & Afri, L. D. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Materi Barisan Dan Deret. *AXIOM: Jurnal Pendidikan dan Matematika*, 9(2), 175. <https://doi.org/10.30821/axiom.v9i2.8069>
- Reni. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. In *State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau* (Vol. 15, Nomor 1). Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sabardila, A., Setiawaty, R., & Markhamah, M. (2020). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bugel Kecamatan Polokarto Melalui Program Sosialisasi. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(2), 235. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i2.556>
- Saputrie, D. V. T., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Analisis Hubungan Perencanaan Dan Partisipasi Masyarakat Dengan Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). *Universitas Diponegoro*, 3.

- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik. In *Deepublish* (Pertama).
- Sufriadi, D., & Zakaria. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 2(2), 62–72. <https://doi.org/10.35870/jpni.v2i2.34>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Taufik, A. (2021). Efektivitas Inovasi Program Bank Sampah (Gerbang Sampah) di Kota Malili. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(April), 101–113. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Tedja, J. N. (2020). *Partisipasi Masyarakat Sebagai Modal Utama Dalam Perubahan Perilaku di Lingkungan RW Layak Anak on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) PBB pada tahun. 1(1)*, 15–36.
- Tri, Rosyani, & Hutwan. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal pembangunan berkelanjutan*, 3(1), 59–65. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/27530>
- Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2022). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>
- Wanimbo, E., Tumengkol, S., & Tumiwa, J. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Memutuskan Mata Rantai Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tingkuluh Kecamatan Wanea Kota Manado. *Journal ilmiah society*, 1(1), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/35816>
- Yulanda, A., & Fachri Adnan, M. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)*, 1(3), 103–110. <https://isora.tpublishing.org/index.php/isora>

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

Berikut adalah pedoman wawancara untuk informan mengenai partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS, dengan pertanyaan yang mengacu pada teori Arnstein (Eight Rungs of Ladder of Citizen Participation):

1. Manipulasi (Manipulation)
 - a. Apakah Anda merasa bahwa keputusan-keputusan dalam program PAMSIMAS sudah ditentukan sebelumnya tanpa masukan dari Masyarakat?
 - b. Apakah ada upaya dari pihak penyelenggara untuk menjelaskan tujuan program, atau Anda merasa hanya mengikuti keputusan yang sudah dibuat?
2. Terapi (Therapy)
 - a. Bagaimana tanggapan Anda terhadap cara pihak PAMSIMAS memberikan edukasi terkait air bersih dan sanitasi? Apakah lebih bersifat mengarahkan tanpa melibatkan ide atau kebutuhan masyarakat?
 - b. Apakah menurut Anda, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan atau kebutuhannya sendiri, atau hanya mengikuti arahan pihak penyelenggara?
3. Informasi (Informing)
 - a. Sejauh mana informasi terkait program PAMSIMAS disampaikan kepada Anda? Apakah masyarakat mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai program tersebut?
 - b. Apakah Anda merasa cukup dipahami tentang peran Anda dalam program ini atau hanya sebatas menerima informasi yang sudah ada?
4. Konsultasi (Consultation)
 - a. Apakah pihak penyelenggara pernah meminta pendapat atau umpan balik dari masyarakat sebelum memulai atau selama program PAMSIMAS berlangsung?
 - b. Apakah ada hasil nyata dari masukan yang Anda atau masyarakat lain berikan terkait program ini?
5. Kompensasi (Placation)

- a. Apakah Anda merasa bahwa beberapa perwakilan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi keterlibatan tersebut hanya sebagai formalitas?
 - b. Apakah ada pihak tertentu dari masyarakat yang menurut Anda diberi kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam program ini?
6. Kerjasama (Partnertship)
- a. Apakah ada kolaborasi antara masyarakat dengan pihak penyelenggara dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam program PAMSIMAS?
 - b. Sejauh mana Anda merasa masyarakat memiliki kendali yang setara dengan pihak penyelenggara dalam pengelolaan program ini?
7. Delegasi kekuasaan (Delegated Power)
- a. Apakah masyarakat memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting terkait pelaksanaan program PAMSIMAS di daerah Anda?
 - b. Apakah Anda merasa ada aspek-aspek dari program ini yang dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat?
8. Kontrol Warga (Citizen Control)
- a. Apakah masyarakat memiliki kendali penuh atas keputusan yang dibuat terkait program PAMSIMAS?
 - b. Apakah ada contoh di mana masyarakat secara mandiri mengambil keputusan penting tanpa intervensi pihak luar?

Pedoman ini bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat terlibat dalam setiap tingkatan partisipasi dalam program PAMSIMAS di Desa Bulu dengan focus pada 8 indikator yang disebut

B. Dokumentasi Wawancara









**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **21908/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Sidrap
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Kepala LP3M Univ. Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor : 434/PRM/II.3.AU/F/LP3M.UMSR/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RIDWAN A**
Nomor Pokok : 0910581122004
Program Studi : Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. Angk. 45 No. 1A Lt. Salorappang Sidrap

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKATDALAMPEMANFAATAN PROGRAM
PENYEDIAANAIRBERSIH DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESABULO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Agustus s/d 20 Oktober 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Kepala LP3M Univ. Muhammadiyah Sidenreng Rappang;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo Email:
kantordesabulo@gmail.com Kode Pos: 91651

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 377 / DB / VIII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI RIFAI M.S.Hi
Jabatan : Kepala Desa Bulo

Menerangkan bahwa :
Nama : RIDWAN A
Nomor Pokok Mahasiswa : 0910581122004
Jurusan / Prog. Studi : Administrasi Publik

Untuk tersebut diatas benar-benar Mahasiswa **Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang** dan akan melaksanakan penelitian di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Dimana yang di teliti dengan Judul "**Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Bulo**"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulo, 29 Agustus 2024
Kepala Desa Bulo

ANDI RIFAI M.S.Hi